



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET

Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

AUDITED



BAGIAN ANGGARAN 114



SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KEUANGAN **Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 *Audited***



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 66 /S/V-XVI.1/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Tahun 2022

Jakarta, 31 Mei 2023

**Yth. Sekretaris Kabinet
Jalan Veteran 17-18
Jakarta 10110**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kontrak sewa pemanfaatan layanan Virtual Private Server (VPS) Tahun Anggaran (TA) 2022 tidak didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini mengakibatkan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan atas sewa layanan *Security Firewall System (Enterprise Intensive)* tidak memiliki dasar atas kebutuhan.
- b. Formulasi dalam menilai kewajaran biaya transportasi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi pada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan perjalanan dinas, berbeda untuk lokasi kegiatan yang sama. Hal ini mengakibatkan pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas ke lokasi yang sama berisiko tidak tepat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Kabinet agar memerintahkan Deputi Administrasi Setkab supaya:

- a. Menginstruksikan kepada PPK kegiatan pengadaan *Virtual Private Server* TA 2022 menyusun KAK untuk pengadaan sewa layanan *Virtual Private Server* ditahun selanjutnya.

- b. Menyusun kebijakan yang mengatur formulasi kewajaran pengisian BBM sebagai biaya transportasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor Nomor 95.a/LHP/XVI/05/2023, dan Nomor 95.b/LHP/XVI/05/2023 masing-masing tertanggal 24 Mei 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

Atas perhatian dan kerja sama Sekretaris Kabinet, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,



Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFA., CGCAE.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran)
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran)
3. Deputi Administrasi Setkab
4. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
5. Inspektur Utama BPK
6. Kepala Ditama Revbang BPK
7. Inspektur Setkab



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Kabinet adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Kabinet. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 14 April 2023
Sekretaris Kabinet,



Framono Anung



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	40
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional.....	54
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	64
VI. Lampiran I: Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	
Lampiran II: Neraca Percobaan Akrual	



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH MEREVIU

**PERNYATAAN TELAH MEREVIU
LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(UNAUDITED)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 (*Unaudited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 3 Februari 2023
Plt. Inspektur Sekretariat Kabinet,

Hendri Daud

NIP 19620629 198302 1 001



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 April 2023
Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022..... 3
Tabel 2	Neraca per 31 Desember 2022..... 4
Tabel 3	Laporan Operasional per 31 Desember 2022..... 5
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022..... 6
Tabel 5	Kriteria Kualitas Piutang..... 17
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap..... 19
Tabel 7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud..... 20
Tabel 8	Rincian Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Sekretariat Kabinet ke BA BUN..... 24
Tabel 9	Realisasi Belanja Barang dan Modal Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022..... 24
Tabel 10	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja..... 26
Tabel 11	Rincian Pagu Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19..... 26
Tabel 12	Pagu Anggaran Berdasarkan Program..... 26
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021..... 27
Tabel 14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022..... 30
Tabel 15	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2022..... 30
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Berdasarkan Jenis Belanja untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021..... 31
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021..... 32
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021..... 33
Tabel 19	Realisasi Belanja Barang (Akun COVID-19) untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022..... 34



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 20	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021.....	35
Tabel 21	Capaian Output Per 31 Desember 2022.....	37
Tabel 22	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 dan 2021.....	40
Tabel 23	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022.....	41
Tabel 24	Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022.....	42
Tabel 25	Rincian Bagian Lancar-TPA Per 31 Desember 2022.....	43
Tabel 26	Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	43
Tabel 27	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022.....	44
Tabel 28	Rincian Pembelian dan Pengembangan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022.....	44
Tabel 29	Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022.....	45
Tabel 30	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2022....	46
Tabel 31	Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2022	46
Tabel 32	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	48
Tabel 33	Mutasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2022.....	49
Tabel 34	Rincian Pembelian dan Pengembangan Aset Tidak Berwujud s.d. 31 Desember 2022.....	50
Tabel 35	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain s.d. 31 Desember 2022.....	50
Tabel 36	Rincian Reklasifikasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2022.....	51
Tabel 37	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2022.....	52
Tabel 38	Rincian Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	53
Tabel 39	Realisasi Beban Barang Operasional Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022.....	55
Tabel 40	Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	56
Tabel 41	Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	56



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 42	Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	57
Tabel 43	Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	58
Tabel 44	Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	58
Tabel 45	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	58
Tabel 46	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	59
Tabel 47	Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	59
Tabel 48	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021....	62
Tabel 49	Rincian BMN Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2022.....	65
Tabel 50	Tabel Rekening <i>Virtual Account</i> Sekretariat Kabinet Tahun 2022.....	67



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto pada Tahun 2022	30

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.702.967.941 dan telah disetor ke Kas Negara. Tahun anggaran 2022 Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi pendapatan, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya pada Sekretariat Kabinet antara lain berasal dari Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin, Pemindahtanganan BMN Lainnya, Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai, Barang dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp295.639.314.880 atau mencapai 96,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp305.755.794.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.728.172.409 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.081.056.665; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.786.779.893; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp860.335.851. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp6.973.453.841 dan Rp11.754.718.568.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp299.857.038.360, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp299.857.038.360. Pendapatan dan Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.312.096.651 dan Rp29.758.214. Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp231.179.569 dan Rp173.381.407. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah masing-masing sebesar Rp1.340.136.599 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp298.516.901.761.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp26.135.395.890 dan perubahan ekuitas yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah menurun sebesar Rp14.380.677.322, sehingga nilai ekuitas akhir adalah Rp11.754.718.568. Perubahan ekuitas tersebut berasal dari selisih antara Defisit Laporan Operasional sebesar Rp298.516.901.761 ditambah dengan Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar (Rp220.234.994) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp284.356.459.433.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

SEKRETARIAT KABINET
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2022		% thd Anggaran	2021
		Anggaran	Realisasi (Neto)		Realisasi (Neto)
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.702.967.941	-	1.659.769.861
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.702.967.941	0,00	1.659.769.861
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	184.129.123.000	181.769.542.466	98,72	169.376.909.390
Belanja Barang	B.4	119.750.934.000	112.116.917.164	93,63	96.460.052.506
Belanja Modal	B.5	1.875.737.000	1.752.855.250	93,45	20.807.942.323
JUMLAH BELANJA		305.755.794.000	295.639.314.880	96,69	286.644.904.219

Jakarta, 14 April 2023
 Sekretaris Kabinet,



**SEKRETARIAT KABINET
NERACA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	683.175.177	1.353.714.428
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	93.496.509
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	1.123.663.654	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	57.888.888
Piutang Bukan Pajak	C.5	8.308.578	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)		8.308.578	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	3.499.993	14.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	(17.500)	(70.000)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Neto)		3.482.493	13.930.000
Persediaan	C.8	2.262.426.763	3.001.206.033
Jumlah Aset Lancar		4.081.056.665	4.520.235.858
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.9	56.954.604.053	58.300.728.108
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.331.598.523	11.100.265.179
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(44.499.422.683)	(40.868.942.285)
Jumlah Aset Tetap		13.786.779.893	28.532.051.002
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	3.499.997
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TPA	C.13	-	(17.500)
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)		-	3.482.497
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	3.482.497
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	4.632.211.682	4.210.800.182
Aset Lain-Lain	C.15	339.889.204	4.019.948.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(4.111.765.035)	(7.497.747.769)
Jumlah Aset Lainnya		860.335.851	733.000.413
JUMLAH ASET		18.728.172.409	33.788.769.770
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.17	6.290.278.664	6.299.659.452
Uang Muka dari KPPN	C.18	683.175.177	1.353.714.428
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.973.453.841	7.653.373.880
JUMLAH KEWAJIBAN		6.973.453.841	7.653.373.880
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	11.754.718.568	26.135.395.890
JUMLAH EKUITAS		11.754.718.568	26.135.395.890
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.728.172.409	33.788.769.770

Jakarta, 14 April 2023

Sekretaris Kabinet,

Pranono Anung



III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT KABINET LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1	-	24.750.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	24.750.000
BEBAN			
	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	181.760.161.678	169.773.335.296
Beban Persediaan	D.2.2	6.241.296.138	5.981.258.382
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	68.668.801.376	65.321.498.277
Beban Pemeliharaan	D.2.4	5.156.436.314	5.511.027.476
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	31.484.564.635	18.825.907.062
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	6.545.760.719	6.282.995.287
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.2.7	17.500	87.500
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		299.857.038.360	271.696.109.280
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(299.857.038.360)	(271.671.359.280)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.3		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	1.312.096.651	1.732.651.788
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	29.758.214	369.982.300
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		1.282.338.437	1.362.669.488
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	231.179.569	2.506.958
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	173.381.407	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		57.798.162	2.506.958
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.340.136.599	1.365.176.446
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.4	(298.516.901.761)	(270.306.182.834)

Jakarta, 14 April 2023
Sekretaris Kabinet,



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT KABINET
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E1	26.135.395.890	10.548.198.156
SURPLUS/DEFISIT LO	E2	(298.516.901.761)	(270.306.182.834)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E3	(220.234.994)	88.639.335
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	(4.938.012)	96.500.000
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2	-	857.780.000
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(215.384.482)	(865.640.665)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	87.500	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E4	284.356.459.433	285.804.741.233
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(14.380.677.322)	15.587.197.734
EKUITAS AKHIR	E5	11.754.718.568	26.135.395.890

Jakarta, 14 April 2023

Sekretaris Kabinet,



A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Kabinet

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Sekretariat Kabinet RI (Setkab) adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Entitas berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat.

Dasar hukum pendirian entitas adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

6. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
7. Penyelenggaraan dukungan teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
8. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
9. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
10. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
11. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Kabinet berkomitmen dengan visi *“Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Sekretariat Kabinet yaitu “Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui:

1. Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.”

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan terdiri atas Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Staf Ahli, Inspektorat, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Pembinaan Penerjemah dengan rincian sebagai berikut:

1. Wakil Sekretaris Kabinet

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Deputi Bidang Perekonomian

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau

Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

7. **Deputi Bidang Administrasi**

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

8. **Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

9. **Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum.

10. **Staf Ahli Bidang Komunikasi**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi.

11. **Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi.

12. **Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional.

13. **Staf Khusus Sekretaris Kabinet**

Bertanggung jawab untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

14. Inspektorat

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

15. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebaran data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

16. Pusat Pembinaan Penerjemah

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Jumlah satker yang ada pada Sekretariat Kabinet adalah 1 (satu) satker.

Ringkasan data umum Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Sekretariat Kabinet (114)
Unit Organisasi	: Sekretariat Kabinet (114)
Provinsi	: DKI Jakarta
Satuan Kerja	: Sekretariat Kabinet (114.01)
Kode Bagian Anggaran	: 114
Kode Satker	: 403112
Alamat	: Jalan Veteran No. 18 Jakarta Pusat

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet juga memberikan dukungan administrasi kepada Utusan Khusus Presiden/Staf Khusus Presiden/Staf Khusus Wakil Presiden (UKP/SKP/SKWP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua (2019-2024), Presiden Joko Widodo telah mengangkat 14 (empat belas) orang SKP dan 10 (sepuluh) orang SKWP. Pengangkatan SKP/SKWP tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 161/TPA sampai dengan 168/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden, Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 91/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pengurangan 3 (tiga) orang Staf Khusus Presiden, pengurangan 3 (tiga) orang Staf Khusus Wakil Presiden, penambahan 3 (tiga) orang Staf Khusus Wakil Presiden dan penambahan 1 (satu) Utusan Khusus Presiden. Tiga Staf Khusus Presiden dan tiga Staf Khusus Wakil Presiden yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara, Andi Taufan, Muhammad Fadjoel Rachman, Dr. Syukriansyah S. Latief, S. H., M. H., Dr. Bambang Widiyanto dan Arif Rahman, S. H., sedangkan penambahan 1 (satu) Staf Khusus Wakil Presiden dan 1 (satu) Utusan Khusus Presiden yang diangkat tersebut adalah Dr. R. Gatot Prio Utomo, Prof. Dr. Zamrotul Mukaffa, M. Ag., H. Arif Rahmansyah Marbun, S. E. dan Muhammad Mardiono. Rincian UKP, SKP dan SKWP sampai dengan 31 Desember 2022 yang mendapatkan dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

- Utusan Khusus Presiden
 1. Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono
- Staf Khusus Presiden
 1. Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho
 2. Staf Khusus Presiden Muhammad Fadjoel Rachman
 3. Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana
 4. Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit

5. Staf Khusus Presiden Arif Budimanta
 6. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia
 7. Staf Khusus Presiden Diaz Faisal Malik Hendropriyono
 8. Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf
 9. Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono
 10. Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi
 11. Staf Khusus Presiden Putri Indahsari Tanjung
 12. Staf Khusus Presiden Gracia Billy Mambrasar
- Staf Khusus Wakil Presiden
 1. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Masyukri Abdillah
 2. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Masduki Baidlowi
 3. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
 4. Staf Khusus Wakil Presiden Robikin Emhas, S.H., M.H.
 5. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Lukmanul Hakin, M. Si.
 6. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
 7. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Muhammad Imam Aziz
 8. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. R. Gatot Prio Utomo
 9. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Zamrotul Mukaffa, M. Ag.
 10. Staf Khusus Wakil Presiden H. Arif Rahmansyah Marbun, S. E.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI dan Monitoring SAKTI yang selanjutnya disingkat MonSAKTI. SAKTI merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul GL dan Pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Sedangkan MonSAKTI adalah Monitoring SAKTI yang digunakan oleh Pengguna Aplikasi SAKTI untuk pengawasan dan pengendalian internal Satker. Selanjutnya, dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 seluruh jenjang

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi MonSAKTI.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Kabinet menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Kabinet dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat Kabinet adalah Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Berikut perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (DJKN)	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Metode Pencatatan nilai persediaan menggunakan metode Perpetual, sedangkan metode penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. PENJELASAN *AUTOMATIC ADJUSTMENT* BELANJA TA 2022

Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19 serta dalam rangka kebijakan antisipatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan APBN, diperlukan langkah strategis berupa pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) pada tiap Kementerian/Lembaga. Hal ini sebagai langkah penghematan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang lebih efisien, terutama dengan *outcome* (hasil) nya. *Automatic adjustment* menjadi salah satu bentuk Penyesuaian Belanja Negara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Peraturan tersebut menjadi kebijakan pengganti realokasi dan *refocusing* yang diterapkan pada tahun sebelumnya. Berikut *automatic adjustment* yang ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan antara lain:

- a. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021, tanggal 29 November 2021, tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.
- b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022, tanggal 23 Mei 2022, tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Sekretariat Kabinet telah melakukan *Automatic Adjustment* belanja sejumlah Rp32.631.594.000 atau sebesar 10 persen dari alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp326.315.931.000. *Automatic Adjustment* tersebut tidak memotong pagu anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022, tetapi hanya dilakukan pemblokiran otomatis anggaran sementara oleh Kementerian Keuangan, sehingga pencadangan tersebut tidak dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Namun demikian, Sekretariat Kabinet mengajukan pembukaan blokir pencadangan anggaran dan telah disetujui oleh Direktur Jendral Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembukaan blokir pencadangan anggaran Tahap I sebesar Rp11.652.932.000 sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-398/AG/AG.4/2022, tanggal

27 September 2022, tentang Pembukaan blokir pencadangan anggaran (AA) DIPA Sekretariat Kabinet TA 2022.

2. Pembukaan blokir pencadangan anggaran Tahap II sebesar Rp482.925.000 sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-474/AG/AG.4/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pembukaan blokir pencadangan anggaran (AA) Tahap II DIPA Sekretariat Kabinet TA 2022.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2022 dan dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun, dilakukan penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari *Automatic Adjustment* dan sisa anggaran yang masih diblokir akan direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022, tanggal 29 September 2022, tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022, tanggal 21 November 2022, tentang Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Rincian realokasi anggaran Sekretariat Kabinet ke BA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Anggaran ke BA BUN yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp12.287.871.000 sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-429/AG/AG.4/2022, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Pengesahan Revisi Anggaran (realokasi belanja pegawai) DIPA Sekretariat Kabinet TA 2022.
2. Pergeseran Anggaran ke BA BUN dari sisa blokir sebesar Rp8.272.266.000 sesuai surat nomor S-558/AG/AG.4/2022, tanggal 2 Desember 2022, tentang Pengesahan Revisi Anggaran ke BA BUN Sekretariat Kabinet TA 2022.

Dengan demikian, pembukaan blokir pencadangan anggaran dan realokasi belanja K/L ke BA BUN akan mengurangi pagu Sekretariat Kabinet dan tidak diperhitungkan dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Rincian pembukaan blokir pencadangan anggaran dan realokasi anggaran Sekretariat Kabinet ke BA BUN adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Sekretariat Kabinet ke BA BUN

URAIAN	2022						
	Pagu Awal	Automatic Adjustment	Buka Blokir Tahap I	Pergeseran Anggaran ke BA BUN	Buka Blokir Tahap II	Pergeseran Anggaran ke BA BUN	Pagu Setelah Pergeseran Anggaran dan Revisi
Belanja							
Belanja Pegawai	196.416.994.000	16.315.797.000	4.027.926.000	12.287.871.000	0	0	184.129.123.000
Belanja Barang	128.239.700.000	16.315.797.000	7.625.006.000	0	482.925.000	8.272.266.000	119.750.934.000
Belanja Modal	1.659.237.000	0	0	0	0	0	1.875.737.000
JUMLAH BELANJA	326.315.931.000	32.631.594.000	11.652.932.000	12.287.871.000	482.925.000	8.272.266.000	305.755.794.000

Sekretariat Kabinet juga beberapa kali melakukan revisi anggaran terkait penanganan Pandemi COVID-19. Revisi terakhir sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-114.01.1.403112/2022, tanggal 28 Desember 2022, mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp4.516.041.000 untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan akun-akun khusus sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran, realisasi dan sisa anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	567.300.000	540.799.883	26.500.117	95,33
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	797.475.000	705.278.350	92.196.650	88,44
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	195.005.000	195.005.000	-	100,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.956.261.000	1.482.292.179	1.473.968.821	50,14
JUMLAH		4.516.041.000	2.923.375.412	1.592.665.588	64,73

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah terealisasi sebesar Rp2.923.375.412 atau 64,73 persen dari anggaran sebesar Rp4.516.041.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan menurunnya kasus pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berikut penggunaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19:

1. Penyelenggaraan *Rapid Test*/SWAB PCR bagi pegawai dengan status ODP (Orang Dalam Pemantauan), dan keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19.
2. Pembayaran biaya paket data dan komunikasi bagi pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) selama masa pandemi COVID-19.
3. Swab/PCR Tes bagi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
4. Swab/PCR Tes bagi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet yang melakukan perjalanan dinas yang masih terkait dalam penanganan pandemi COVID-19.
5. Pengadaan vitamin dan masker bagi pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet serta pengadaan peralatan kantor dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet juga telah menerbitkan peraturan internal antara lain:

1. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran
Rp305.775.794.000

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022 semula adalah sebesar Rp326.315.931.000 dan setelah dilakukan Revisi DIPA menjadi sebesar Rp305.755.794.000. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali *Automatic Adjustment* tanpa mengurangi jumlah anggaran semula, 2 (dua) kali pembukaan blokir pencadangan anggaran serta 2 (dua) kali pergeseran anggaran Sekretariat Kabinet ke BA BUN. Dengan demikian, pembukaan blokir pencadangan anggaran dan pergeseran belanja K/L ke BA BUN akan mengurangi pagu Sekretariat Kabinet dan tidak diperhitungkan dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Rincian pagu anggaran setelah realokasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	2022	
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	196.416.994.000	184.129.123.000
Belanja Barang	128.239.700.000	119.750.934.000
Belanja Modal	1.659.237.000	1.875.737.000
JUMLAH BELANJA	326.315.931.000	305.755.794.000

Sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali revisi anggaran. Revisi terakhir mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp4.516.041.000 untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan akun-akun khusus sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Pagu Belanja Barang Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	URAIAN	2022	
		Awal	Setelah Revisi
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	567.300.000
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.542.300.000	797.475.000
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	195.005.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.251.796.000	2.956.261.000
JUMLAH		4.794.096.000	4.516.041.000

Penganggaran belanja barang penanganan pandemi COVID-19 tersebut dilakukan sebagai langkah Sekretariat Kabinet dalam melindungi kesehatan, membangkitkan produktivitas, dan mengakhiri pandemi COVID-19.

Apabila dilihat berdasarkan program, jumlah anggaran Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

Tabel 12 Pagu Anggaran Berdasarkan Program

PROGRAM	2022	
	Awal	Revisi
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	37.451.201.000	32.746.963.000
Program Dukungan Manajemen (WA)	288.864.730.000	273.008.831.000
JUMLAH BELANJA	326.315.931.000	305.755.794.000

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.702.967.941 dan Rp1.659.769.861. Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi pendapatan, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun, pada tahun berjalan terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin secara angsuran, Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan barang persediaan (Rusak Berat), Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, Pendapatan Lain-Lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai, Barang dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,60 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin dan Pemindahtanganan BMN lainnya masing-masing sebesar Rp1.259.540.656 dan Rp124.444.887. Selain itu, Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2022 juga memperoleh pendapatan yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp24.750.000 dan Pendapatan Lain- Lain berupa Penerimaan Kembali Belanja (Pegawai, Barang dan Modal) Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp294.232.398.

Perbandingan realisasi PNBPN 2022 dan 2021 berdasarkan jenis akun adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Akun	Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.259.540.656	1.657.262.903	-24,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan Lainnya	124.444.887	0	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24.750.000	0	-
Jumlah Pendapatan Pengelolaan BMN		1.408.735.543	1.657.262.903	-15,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	67.728.892	556.958	12060,50
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.024.691	1.950.000	-47,45
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	225.478.815	0	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		294.232.398	2.506.958	11636,63
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.702.967.941	1.659.769.861	2,60

Sedangkan rincian PNBPN sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.259.540.656 berupa:
 - a. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.147.501.437 sesuai Risalah Lelang Nomor 592/26/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berupa 14 (empat belas) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000601645 dan NTPN 9F17C1JNFCNRAPPF tanggal 25 Agustus 2022.
 - b. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.039.215 sesuai Risalah Lelang Nomor 912/26/2022 tanggal 29 November 2022 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000327024 dan NTPN D30555DENCJI4LN tanggal 1 Desember 2022.
 - c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.000.004 berupa angsuran penjualan kendaraan mobil dinas selama bulan Januari s.d. Desember 2022 (12 kali angsuran) sebesar Rp1.166.667 per bulan.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan Lainnya sebesar Rp124.444.887 berupa:
 - a. Penjualan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya sebesar Rp57.888.888 sesuai Risalah Lelang Nomor 1106/26/2021 tanggal 29 Desember 2021 berupa 1.114 unit peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Hasil Penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000581349 dan NTPN 59C38N3E0LE3O71 tanggal 3 Januari 2022.
 - b. Penjualan Peralatan dan Mesin dan barang persediaan sebesar Rp66.555.999 sesuai Risalah Lelang Nomor 1007/26/2022 tanggal 21 Desember 2022 berupa 1 (satu) paket peralatan mesin dan barang persediaan. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000222837 dan NTPN 2BECA7QLU74D0HOC tanggal 22 Desember 2022.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan berupa pencairan jaminan pekerjaan atas wanprestasi oleh penyedia pengadaan perangkat perekam

audio dan audio visual Sidang Kabinet TA 2021 sebesar Rp24.750.000.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp67.728.892 berupa pengembalian tunjangan kinerja bulan Oktober 2021 untuk Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Muhammad Fadjoel Rachman, termasuk Asisten dan Pembantu Asisten SKP Bidang Komunikasi. Beliau mengundurkan diri sebagai SKP Bidang Komunikasi karena dilantik sebagai Duta Besar untuk Kazakhstan pada bulan Oktober 2021.
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.024.691 berupa pengembalian sisa uang Dukungan Operasional Menteri (DOM) bulan Desember 2021.
6. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp225.478.815 berupa:
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 1 dan *Basement* Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp144.681.950.
 - b. Pengembalian kelebihan pembayaran konsultan pengawas renovasi Lantai 1 dan *Basement* Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.650.000.
 - c. Pengembalian kekurangan volume pekerjaan partisi ruang kerja gedung pakarti sebesar Rp37.477.200.
 - d. Pengembalian atas kemahalan harga Peralatan dan Mesin ruang kerja gedung pakarti sebesar Rp39.669.665.

Realisasi Belanja
Rp295.639.314.880

B.2 Belanja

Realisasi belanja bruto pada 31 Desember 2022 sebesar Rp295.663.419.989 atau 96,70 persen dari anggaran belanja sebesar Rp305.755.794.000. Pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.105.109, sehingga realisasi belanja neto Sekretariat Kabinet pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp295.639.314.880 atau sebesar 96,69 persen dari anggaran belanja. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan struktural PNS, belanja tunjangan umum PNS dan pengembalian belanja barang berupa pengembalian belanja perjalanan biasa. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022

Uraian	2022					
	Anggaran	Realisasi Bruto	%	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	184.129.123.000	181.790.763.405	98,73	21.220.939	181.769.542.466	98,72
Belanja Barang	119.750.934.000	112.119.801.334	93,63	2.884.170	112.116.917.164	93,63
Belanja Modal	1.875.737.000	1.752.855.250	93,45	0	1.752.855.250	93,45
Jumlah	305.755.794.000	295.663.419.989	96,70	24.105.109	295.639.314.880	96,69

Dalam bentuk grafik, komposisi anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto Tahun 2022



Realisasi belanja pada 31 Desember 2022 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2022

Program	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	% Neto
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	32.746.963.000	31.290.589.436	0	31.290.589.436	95,55
Program Dukungan Manajemen (WA)	273.008.831.000	264.372.830.553	24.105.109	264.348.725.444	96,83
JUMLAH	305.755.794.000	295.663.419.989	24.105.109	295.639.314.880	96,69

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	181.769.542.466	169.376.909.390	7,32
Belanja Barang	112.116.917.164	96.460.052.506	16,23
Belanja Modal	1.752.855.250	20.807.942.323	-91,58
JUMLAH	295.639.314.880	286.644.904.219	3,14

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen dari realisasi belanja periode yang sama tahun 2021. Kenaikan realisasi belanja tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 7,32 persen karena adanya pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, serta pemberian hak keuangan pada saat Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi pejabat dan pegawai non PNS pada SKP dan SKWP. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
2. Kenaikan Belanja Barang sebesar 16,23 persen karena adanya peningkatan belanja barang persediaan yang disebabkan oleh meningkatnya pengadaan *security paper*, amplop, cover risalah, kertas kop, *toner printer* dan lainnya serta peningkatan pemakaian mesin *fotocopy*. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya sidang kabinet, rapat terbatas dan rapat pertemuan Presiden dengan seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, berikut jajarannya meliputi Kapolres, Kapolda dan lainnya. Selain itu, peningkatan belanja barang berasal dari meningkatnya program pelatihan, kegiatan *workshop*, pengadaan soal seleksi kompetensi jabatan Fungsional Penerjemah Ahli Pertama, dan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri yang signifikan sejalan dengan menurunnya kasus harian covid dan guna mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

3. Penurunan Belanja Modal sebesar 91,58 persen karena alokasi anggaran belanja modal lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun 2021. Hal ini terjadi karena tidak adanya pekerjaan renovasi ruang kerja sebagaimana terdapat pada anggaran tahun 2021.

*Belanja Pegawai
Rp181.769.542.466*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.769.542.466 dan Rp169.376.909.390 atau mengalami kenaikan 7,32 persen dari realisasi belanja pegawai periode yang sama tahun 2021. Hal tersebut disebabkan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, serta pemberian hak keuangan pada saat Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi pejabat dan pegawai non PNS pada SKP dan SKWP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN	2022	2021	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39.528.567.481	38.063.259.431	3,85
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(3.515.939)	(6.654.446)	-47,16
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	57.084.353.041	245.000.000	23.199,74
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	(17.705.000)	-	-
5122	Belanja Lembur	726.780.000	246.318.000	195,06
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	84.451.062.883	130.934.988.247	-35,50
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	-	(106.001.842)	-
JUMLAH		181.769.542.466	169.376.909.390	7,32

*Belanja Barang
Rp112.116.917.164*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp112.116.917.164 dan Rp96.460.052.506 atau mengalami kenaikan sebesar 16,23 persen dari realisasi belanja barang periode yang sama tahun lalu. Penyebab kenaikan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan belanja barang persediaan berupa persediaan barang konsumsi yaitu peningkatan pengadaan *security paper*, amplop, cover risalah, kertas kop, *toner printer* dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya sidang kabinet, rapat terbatas dan rapat pertemuan Presiden dengan seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, berikut jajarannya meliputi Kapolres, Kapolda dan lainnya.
2. Peningkatan belanja jasa berupa belanja sewa yaitu peningkatan biaya sewa mesin fotokopi dikarenakan meningkatnya jumlah pemakaian *copy* per lembarnya. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya pengandaan risalah pertemuan Presiden dengan seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, berikut jajarannya meliputi Kapolres, Kapolda dan lainnya.
3. Peningkatan belanja jasa berupa belanja jasa lainnya yaitu peningkatan biaya program pelatihan, kegiatan *workshop* serta pengadaan soal seleksi kompetensi jabatan Fungsional Penerjemah Ahli Pertama yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
4. Peningkatan belanja perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang sejalan dengan pemerataan realisasi vaksinasi dan penurunan signifikan kasus harian COVID-19 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Rincian perbandingan realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

Akun	URAIAN	2022	2021	Naik/(Turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	20.709.385.259	19.510.078.902	1.199.306.357	6,15
5211	Pengembalian Belanja Barang Operasional	0	-9.390.000	9.390.000	-
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.403.003.606	8.866.548.838	-1.463.545.232	-16,51
5218	Belanja Barang Persediaan	3.194.917.675	2.876.328.100	318.589.575	11,08
5221	Belanja Jasa	40.597.561.363	38.196.696.728	2.400.864.635	6,29
5231	Belanja Pemeliharaan	8.719.176.048	8.193.882.876	525.293.172	6,41
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.200.787.902	18.781.644.327	10.419.143.575	55,48
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-2.884.170	0	-2.884.170	-
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.294.969.481	44.262.735	2.250.706.746	5084,88
JUMLAH		112.116.917.164	96.460.052.506	15.656.864.658	16,23

Sekretariat Kabinet telah mengalokasikan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.516.041.000. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat realisasi anggaran atas belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.923.375.412 atau 64,73 persen. Rincian realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Belanja Barang (Akun COVID-19) untuk Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	567.300.000	540.799.883	26.500.117	95,33
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	797.475.000	705.278.350	92.196.650	88,44
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	195.005.000	195.005.000	0	100,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.956.261.000	1.482.292.179	1.473.968.821	50,14
JUMLAH		4.516.041.000	2.923.375.412	1.592.665.588	64,73

Langkah mitigasi yang sudah dilakukan untuk mengurangi salah saji terkait pengungkapan akun/transaksi untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain:

1. Melakukan analisis, verifikasi dan *double checking* pada saat melakukan pembebanan akun terkait penanganan pandemi COVID-19.
2. Melakukan revisi anggaran dan koreksi transaksi pengeluaran apabila terjadi kesalahan pembebanan akun khususnya akun penanganan pandemi COVID-19 yang sudah terbit SPM/SP2D sampai dengan periode pelaporan.
3. Melakukan pemutakhiran data revisi pada seluruh aplikasi yang digunakan. Hal tersebut dilakukan agar penganggaran dan pembebanan akun khusus COVID-19 menjadi akurat dan akuntabel.

*Belanja Modal
Rp1.752.855.250*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.752.855.250 dan Rp20.807.942.323. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 91,58 persen dibandingkan realisasi belanja modal periode yang sama tahun lalu.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN	2022	2021	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.331.443.750	10.571.279.288	-87,41
5361	Belanja Modal Lainnya	421.411.500	10.236.663.035	-95,88
Jumlah belanja bruto		1.752.855.250	20.807.942.323	-91,58
Pengembalian belanja modal		0	0	0,00
JUMLAH BELANJA (NETO)		1.752.855.250	20.807.942.323	(91,58)

Penurunan Belanja Modal karena alokasi anggaran belanja modal lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun 2021. Hal ini terjadi karena tidak adanya kegiatan renovasi ruang kerja sebagaimana terdapat pada anggaran tahun 2021. Realisasi belanja modal tersebut berupa pembelian alat pengolah data, *printer*, *scanner*, *hardisk*, *switch*, pengembangan web serta pengadaan pompa air. Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat anggaran belanja modal yang dialihkan anggaran percepatan penanganan pandemi COVID-19.

B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pengungkapan Capaian Output Strategis Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2022, capaian output strategis Sekretariat Kabinet berada pada Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2 berupa rekomendasi kebijakan, antara lain :

- a. 498 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah.
- b. 498 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
- c. 107 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.
- d. 135 rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Sebagian besar rekomendasi yang dihasilkan dimanfaatkan dan/atau ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Berikut ini beberapa rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan telah dimanfaatkan dan/atau ditindaklanjuti *stakeholders*.

1. Rencana Kerja Sama di Sektor Energi antara Indonesia dengan Denmark, Norwegia, dan Islandia dalam rangka Peningkatan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pemberdayaan Industri dalam Negeri;
2. Pertimbangan Menteri Pertanian terhadap Rencana Pengintegrasian Kelembagaan Karantina;
3. Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Kenaikan Suhu dan Perkembangan Iklim;
4. Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelaksanaan Reklamasi;
5. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara;
6. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas;
7. Pengalihan akses jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan;
8. Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo;
9. Permohonan Dispensasi Kegiatan Relokasi (Pembangunan) Gedung Kantor untuk Pengembangan Penataan Kawasan Balekambang;
10. Kajian Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan;
11. Perkembangan Program Bambu (Strategi Nasional Industri Bambu Berbasis Desa);
12. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2022.

Sedangkan seluruh output Sekretariat Kabinet yang telah dicapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Capaian Output Per 31 Desember 2022

Unit Kerja	Kegiatan IKK (Outcome) RO (Output) Indikator RO	Anggaran	Output					Gap (9-5)		
			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Keluaran/ Output Diharapkan			Progress Capaian Output	
						Satuan	Target Keluaran			Realisasi Volume Keluaran
Polhukam 1 (Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 536.476.000	Rp 536.142.210	99,94%	Rekomen dasi Kebijakan	37	47	127,03%	27,09%
Polhukam 1 (Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 361.770.000	Rp 361.759.053	100,00%	Rekomen dasi Kebijakan	14	5	35,71%	-64,28%
Polhukam 2 (Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 370.956.000	Rp 370.844.855	99,97%	Rekomen dasi Kebijakan	45	38	84,44%	-15,53%
Polhukam 2 (Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 529.044.000	Rp 527.717.042	99,75%	Rekomen dasi Kebijakan	12	13	108,33%	8,58%
Polhukam 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp 648.769.000	Rp 643.913.308	99,25%	Rekomen dasi Kebijakan	41	109	265,85%	166,60%
Polhukam 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp 251.231.000	Rp 250.263.373	99,61%	Rekomen dasi Kebijakan	4	3	75,00%	-24,61%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 784.198.000	Rp 783.844.450	99,95%	Rekomen dasi Kebijakan	44	41	93,18%	-6,77%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 315.802.000	Rp 312.292.881	98,89%	Rekomen dasi Kebijakan	15	11	73,33%	-25,56%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp 17.790.000	Rp 17.790.000	100,00%	Layanan	1	1,00	100,00%	0,00%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 111.166.000	Rp 106.648.342	95,94%	Dokumen	68	68,00	100,00%	4,06%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	RO 2_KRO 2_FO	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 71.044.000	Rp 71.043.310	100,00%	Dokumen	52	52	100,00%	0,00%
Perekonomian 1 (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 322.892.000	Rp 319.348.634	98,90%	Rekomen dasi Kebijakan	49	157	320,41%	221,51%
Perekonomian 1 (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 310.837.000	Rp 308.705.630	99,31%	Rekomen dasi Kebijakan	16	54	337,50%	238,19%
Perekonomian 2 (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp 492.760.000	Rp 491.513.816	99,75%	Rekomen dasi Kebijakan	46	166	360,87%	261,12%
Perekonomian 2 (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp 407.240.000	Rp 403.591.994	99,10%	Rekomen dasi Kebijakan	20	25	125,00%	25,90%
Perekonomian 3 (Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp 520.262.000	Rp 519.893.585	99,93%	Rekomen dasi Kebijakan	38	74	194,74%	94,81%
Perekonomian 3 (Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp 379.738.000	Rp 379.691.157	99,99%	Rekomen dasi Kebijakan	24	35	145,83%	45,85%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp 381.883.000	Rp 381.460.023	99,89%	Rekomen dasi Kebijakan	43	82	190,70%	90,81%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp 678.436.000	Rp 678.330.468	99,98%	Rekomen dasi Kebijakan	25	28	112,00%	12,02%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp 20.065.000	Rp 20.044.479	99,90%	Layanan	1	1	100,00%	0,10%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 58.362.000	Rp 58.317.912	99,92%	Dokumen	68	68	100,00%	0,08%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	RO 2_KRO 2_FO	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 48.848.000	Rp 48.743.544	99,79%	Dokumen	52	52	100,00%	0,21%
PMK1 (Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 698.702.000	Rp 660.914.523	94,59%	Rekomen dasi Kebijakan	25	107	428,00%	333,41%

Unit Kerja	Kegiatan IKK (Outcome) RO (Output) Indikator RO		Anggaran			Output				Gap (9-5)
			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Output Dihasilkan			Progres Capaian Output	
						Satuan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran		
PMK1 (Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 201.298.000	Rp 192.434.876	95,60%	Rekomendasi Kebijakan	14	14	100,00%	4,40%
PMK2 (Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 291.827.000	Rp 289.532.666	99,21%	Rekomendasi Kebijakan	8	32	400,00%	300,79%
PMK2 (Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 387.318.000	Rp386.163.512	99,70%	Rekomendasi Kebijakan	9	10	111,11%	11,41%
PMK3 (Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 506.414.000	Rp 488.757.177	96,51%	Rekomendasi Kebijakan	20	22	110,00%	13,49%
PMK3 (Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 226.214.000	Rp214.226.921	94,70%	Rekomendasi Kebijakan	7	7	100,00%	5,30%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 386.756.000	Rp360.509.246	93,21%	Rekomendasi Kebijakan	5	9	180,00%	86,79%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 573.431.000	Rp565.590.852	98,63%	Rekomendasi Kebijakan	7	8	114,29%	15,65%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp 69.931.000	Rp 62.272.160	100,00%	Layanan	1	1	100,00%	10,95%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 23.525.000	Rp 21.207.000	95,94%	Dokumen	68	68	100,00%	9,85%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	RO 2_KRO 2_FO	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 30.697.000	Rp 26.163.000	85,23%	Dokumen	52	52	100,00%	14,77%
Marivest 1 (Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp 359.741.000	Rp 356.711.434	99,16%	Rekomendasi Kebijakan	27	36	133%	34,18%
Marivest 1 (Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp 220.601.000	Rp 215.514.165	97,69%	Rekomendasi Kebijakan	8	7	87,50%	10,19%
Marivest 2 (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 306.721.000	Rp 280.663.625	91,50%	Rekomendasi Kebijakan	26	62	238,46%	146,96%
Marivest 2 (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 357.261.000	Rp 340.365.803	95,27%	Rekomendasi Kebijakan	9	10	111,11%	15,84%
Marivest 3 (Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 338.680.000	Rp336.831.702	99,45%	Rekomendasi Kebijakan	27	59	218,52%	119,06%
Marivest 3 (Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 259.121.000	Rp 256.026.924	98,81%	Rekomendasi Kebijakan	8	12	150,00%	51,19%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata)	RO 1	Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 363.844.000	Rp 362.617.060	99,66%	Rekomendasi Kebijakan	30	33	110,00%	10,34%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata)	RO 2	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 492.819.000	Rp 492.280.209	99,89%	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100,00%	0,11%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata)	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp 22.340.000	Rp 22.258.810	100,00%	Layanan	1	1	100,00%	0,36%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata)	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 96.109.000	Rp 92.072.497	95,94%	Dokumen	68	68	100,00%	4,20%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata)	RO 2_KRO 2_FO	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 7.967.000	Rp4.466.000	56,06%	Dokumen	52	52	100,00%	43,94%
DKK 1 (Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan)	RO 1	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp4.470.996.000	Rp 4.369.922.175	97,74%	Sidang	50	153	306,00%	208,26%
DKK 2 (Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan)	RO 1	Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp 1.757.879.000	Rp 1.714.545.727	97,53%	Sidang	50	152	304,00%	206,47%
DKK 2 (Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan)	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp60.887.000	Rp57.884.940	95,07%	Layanan	1	1	100,00%	4,93%
DKK 2 (Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan)	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 250.000	Rp -	0,00%	Dokumen	68	68	100,00%	100,00%
DKK 2 (Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan)	RO 2_KRO 2_FO	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 250.000	Rp -	0,00%	Dokumen	52	52	100,00%	100,00%
DKK 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol)	RO 1	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp 1.388.252.000	Rp 1.360.329.066	97,99%	Layanan	1	1,00	100,00%	2,01%
DKK 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol)	RO 2	Layanan Protokol	Rp 740.644.000	Rp727.371.958	98,21%	Layanan	1	1,00	100,00%	1,79%
DKK 4 (Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan)	RO 1	Naskah kepresidenan	Rp 748.876.000	Rp 745.693.837	99,58%	Dokumen	160	160	100,00%	0,42%
DKK 4 (Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan)	RO 1	Dokumen terjemahan	Rp 251.124.000	Rp 244.275.818	97,27%	Dokumen	500	500	100,00%	2,73%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 1	Layanan Perkantoran	Rp 184.129.123.000	Rp181.790.763.405	98,73%	Layanan	1	1,00	100,00%	1,27%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 2	Layanan Manajemen SDM	Rp 4.294.691.000	Rp 4.012.386.922	93,43%	Orang	908	908	100,00%	5,57%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 1	Layanan Hukum	Rp28.100.000	Rp 22.975.000	81,76%	Layanan	1	1,00	100,00%	18,24%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 319.234.000	Rp 110.739.760	34,69%	Layanan	1	1,00	100,00%	65,31%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 3	Layanan bantuan hukum	Rp 19.700.000	Rp -	0,00%	Layanan	1	1,00	100,00%	100,00%

Unit Kerja	Kegiatan IKK (Outcome) RO (Output) Indikator RO		Anggaran			Output (RO_IRO)				Gap (9-5)
			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Output Diharapkan			% Capaian Output	
						Satuan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran		
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	RO 1	Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir	Rp 1.851.201.000	Rp 1.353.213.000	73,10%	Keppres	100	68	68,00%	5,10%
Biro Perencanaan dan Keuangan	RO 1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 356.003.000	Rp 349.306.655	98,12%	Dokumen	4	4	100,00%	1,88%
Biro Perencanaan dan Keuangan	RO 1	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 545.170.000	Rp 545.093.378	99,99%	Dokumen	4	4	100,00%	0,01%
Biro Perencanaan dan Keuangan	RO 1	Layanan revisi anggaran	Rp 262.250.000	Rp 262.105.000	99,94%	Dokumen	1	1	100,00%	0,06%
Biro Perencanaan dan Keuangan	RO 2	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 225.858.000	Rp 225.679.870	99,92%	Dokumen	5	5	100,00%	0,08%
Biro Umum	RO 1	Layanan BMN	Rp 2.088.493.000	Rp 1.669.101.972	79,92%	Layanan	1	1	100,00%	20,08%
Biro Umum	RO 2	Layanan Umum	Rp 1.235.386.000	Rp 939.609.726	76,06%	Layanan	1	1,00	100,00%	23,94%
Biro Umum	RO 3	Layanan Perkantoran	Rp 62.178.234.000	Rp 58.662.657.412	94,35%	Layanan	1	1	100,00%	5,65%
Biro Umum	RO 4	Layanan Sarana Internal	Rp 1.297.237.000	Rp 1.183.258.750	91,21%	Unit	88	86	97,73%	5,51%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	RO 1	Layanan Umum	Rp 115.516.000	Rp 85.363.601	73,90%	Layanan	1	1	100,00%	26,10%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	RO 2	Layanan Data dan Informasi	Rp 7.140.981.000	Rp 6.993.777.492	97,94%	Layanan	2	2	100,00%	2,06%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	RO 3	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 311.190.000	Rp 288.269.820	92,63%	Dokumen	12	12	100,00%	7,37%
Inspektorat	RO 1	Layanan Umum	Rp 6.424.000	Rp 6.000.000	93,40%	Layanan	1	1,00	100,00%	5,60%
Inspektorat	RO 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 220.000	Rp -	0,00%	Dokumen	6	6,00	100,00%	100,00%
Inspektorat	RO 3	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 660.000	Rp 660.000	100,00%	Dokumen	17	17	100,00%	0,00%
Inspektorat	RO 4	Layanan Audit Internal	Rp 544.415.000	Rp 536.106.692	98,47%	Laporan	13	13	100,00%	1,53%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 1	Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerimaan (PFP)	Rp 775.164.000	Rp 773.263.802	99,75%	Rekomendasi Kebijakan	86	190	220,93%	121,18%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 1	Pejabat Fungsional Penerimaan (PFP) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penerimaan	Rp 776.804.000	Rp 769.980.772	99,12%	Orang	35	104	297,14%	198,02%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 1_KRO 1_FO	Layanan Umum	Rp 53.841.000	Rp 51.435.000	95,53%	Layanan	1	1	100,00%	4,47%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 2_KRO 1_FO	Layanan Data dan Informasi	Rp 43.763.000	Rp 42.284.936	96,62%	Layanan	1	1	100,00%	3,38%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 1_KRO 2_FO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 18.799.000	Rp 17.923.200	95,34%	Dokumen	17	17	100,00%	4,66%
Pusat Pembinaan Penerimaan	RO 2_KRO 2_FO	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pusat Pembinaan Penerimaan	Rp 11.684.000	Rp 10.624.000	90,93%	Dokumen	9	9	100,00%	9,07%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	RO 1	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 724.619.000	Rp 701.188.216	96,77%	Dokumen	23	23	100,00%	3,23%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	RO 1	Layanan Protokoler	Rp 1.283.928.000	Rp 784.977.541	61,14%	Layanan	6	6	100,00%	38,86%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	RO 1	Layanan Umum	Rp 3.005.185.000	Rp 2.383.929.187	79,33%	Layanan	4	4	100,00%	20,67%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	RO 1	Layanan pendampingan Sekretaris Pribadi dalam pelaksanaan tugas Presiden	Rp 322.598.000	Rp 256.974.058	79,66%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00%	20,34%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	RO 2	Layanan dukungan komunikasi kepada Presiden	Rp -	Rp -	0,00%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0,00%	0,00%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	RO 3	Layanan khusus Staf Khusus Presiden kepada Presiden berdasarkan penugasan	Rp 6.567.325.000	Rp 6.216.175.621	94,65%	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100,00%	5,35%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	RO 4	Layanan khusus Staf Khusus Wakil Presiden kepada Wakil Presiden berdasarkan penugasan	Rp 1.961.954.000	Rp 1.778.091.452	90,63%	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100,00%	9,37%

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp683.175.177

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp683.175.177 dan Rp1.353.714.428 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pertanggungjawaban GU Nihil sebesar Rp1.116.824.823 dari total UP sebesar Rp1.800.000.000, sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp683.175.177. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan awal tahun 2023. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-327/PB/2022, tanggal 16 Desember 2022, hal Persetujuan Penggunaan Sisa Dana Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai Tahun Anggaran (TA) 2022 yang Diperhitungkan dengan Penerimaan UP Tunai TA 2023.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Uang Tunai	131.434.946	439.768.476
Rekening Bank (UP)	551.740.231	913.945.952
Uang Muka (UM)	0	0
Kuitansi UP dan TUP	0	0
JUMLAH	683.175.177	1.353.714.428

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rpo

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp93.496.509. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.

C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.123.663.654 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022

No.	Paket Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	No. SPM	No. SP2D	Belanja Dibayar Dimuka
A. Pengadaan Lisensi (523199)						
1	Perpanjangan Lisensi Bandwidth Management	17/03/2022	17/03/2023	00152A	220181701000939	27.866.666
2	Pengadaan Pemutakhiran Lisensi IPAM	04/04/2022	03/04/2023	00351A	220181701001808	13.453.151
3	Perpanjangan Lisensi Aplikasi Perpustakaan Elektronik	31/08/2022	31/08/2023	01293A	220181701007624	46.475.410
4	Perpanjangan Lisensi Zimbra NE Standart Edition dan Maintenance Support	09/09/2022	31/12/2023	01022A	220181701006292	107.930.099
5	Pengadaan Perpanjangan Lisensi Firewall Cisco Asa	14/10/2022	13/10/2023	00750A	220181701004244	43.487.671
6	Perpanjangan Lisensi dan Support Cisci Nexus 9300	14/10/2022	13/10/2023	01023A	220181701006293	43.139.770
7	Pengadaan Lisensi Next Generation Firewall (NGFW) Checkpoint dan Networking System Solarwinds	01/11/2022	31/10/2023	01183A	220181302030849	684.124.932
8	Perpanjangan Lisensi Server HCI	23/11/2022	04/12/2023	01538A	220181701009642	116.037.103
Jumlah Pengadaan Lisensi Dibayar Dimuka						1.082.514.802
B. Pengadaan Sewa (522141)						
1	Pembayaran Pengadaan Aplikasi Video Conference	16/04/2022	16/04/2023	00341A	220181303005406	41.148.852
Jumlah Pengadaan Sewa Dibayar Dimuka						41.148.852
Jumlah Pengadaan Lisensi dan Sewa Dibayar Dimuka						1.123.663.654

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp57.888.888. Pendapatan yang Masih Harus Diterima digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan.

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.308.578 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp8.308.578 adalah piutang lainnya yang berasal dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet. Atas kelebihan pembayaran

tersebut, pejabat/pegawai selaku pelaku perjalanan dinas wajib menyetorkan pengembalian ke Kas Negara. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Piutang Lainnya
1	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas SKP AM	00695A	220181303010235	02-Aug-22	288.578
2	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas SKP GBM	00695A	220181303010235	02-Aug-22	780.000
3	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas SKP DHP	01596A	220181701010566	30 des 22	7.240.000
JUMLAH					8.308.578

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp3.499.993

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Bruto per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.499.993 dan Rp14.000.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi Piutang TPA Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Piutang TPA Sekretariat Kabinet berasal dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas jabatan sebesar Rp28.000.000 yang dibayar secara angsuran selama 24 bulan sebesar Rp1.166.667. Hal tersebut sesuai Perjanjian Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Sekretariat Kabinet Nomor: PERJ-1/SETKAB/ADM/03/2021 pada tanggal 8 Maret 2021.

Sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilakukan pelunasan cicilan ke-1 sampai dengan ke-21 sebesar Rp24.500.007. Dengan demikian, nilai Bagian Lancar TPA yang diakui dan disajikan dalam Neraca pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp3.499.993.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Rp17.500)

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp17.500) dan (Rp70.000). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar-TPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan Bagian Lancar-TPA berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang

Bagian Lancar TPA sampai dengan periode pelaporan adalah lancar sehingga persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar-TPA Sekretariat Kabinet yang digunakan sebesar 0,50 persen sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 25 Rincian Bagian Lancar-TPA Per 31 Desember 2022

Uraian	% Penyisihan	2022	2021
Bagian Lancar TPA		3.499.993	14.000.000
Penyisihan Bagian Lancar TPA	0,50%	(17.500)	(70.000)
Bagian Lancar TPA Neto		3.482.493	13.930.000

*Persediaan
Rp2.262.426.763*

C.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.262.426.763 dan Rp3.001.206.033. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sumber perolehan persediaan sampai 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari pembelian. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

JENIS PERSEDIAAN	2022	2021
Barang Konsumsi	2.173.785.888	2.821.230.533
Barang untuk Pemeliharaan	88.640.875	179.975.500
Bahan Baku	0	0
JUMLAH	2.262.426.763	3.001.206.033

Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat mutasi tambah berupa pembelian atas Persediaan Barang untuk pemeliharaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp195.005.000 berupa masker.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: 47/Setkab/OF/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.

*Peralatan dan Mesin
Rp56.954.604.053*

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp56.954.604.053 dan Rp58.300.728.108 . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 27 Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	58.300.728.108
Mutasi tambah:		1.708.153.750
Pembelian Peralatan dan Mesin		1.288.640.000
Pengembangan Nilai Aset		42.803.750
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap		376.710.000
Mutasi kurang:		3.054.277.805
Penghentian Aset dari penggunaan		3.021.021.147
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		33.256.658
Saldo per 31 Desember 2022		56.954.604.053
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		(44.499.422.683)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	12.455.181.370

Mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.708.153.750 yang berasal dari:

1. Pembelian dan pengembangan peralatan mesin sebesar Rp1.331.443.750 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 28 Rincian Pembelian dan Pengembangan Peralatan dan Mesin Sampai dengan 31 Desember 2022

NO	Nama Barang	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
					Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
A. Pembelian								
1	PC Unit	00115A	220181302006176	29-Mar-22	73	927.760.000	-	-
2	Pompa Air dan Pompa Tinja	00369A	220181701001876	20-May-22	2	78.000.000	-	-
3	Printer dan Scanner	00435A	220181701002747	10-Jun-22	12	134.695.000	1	790.000
4	Switch Manageable	01542A	2201817011009630	26-Dec-22	3	148.185.000	-	-
Jumlah Pembelian					90	1.288.640.000	1	790.000
B. Pengembangan Nilai Aset								
1	Hard Disk	00907A	220181701005287	26-Sep-22	7	9.100.000	-	-
2	Hard Disk SSD	01111A	220181701006527	25-Oct-22	16	20.800.000	-	-
3	Hard Disk SSD	01718A	220181701011019	31-Dec-22	9	12.903.750	-	-
Jumlah Pengembangan					32	42.803.750	0	0
Jumlah Pembelian dan Pengembangan					122	1.331.443.750	1	790.000

2. Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp376.710.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan Kembali dan Perubahan Kondisi Barang Milik Negara dari Penggunaan yang Sudah Dihentikan Penggunaannya Nomor: BA.43.1/SETKAB/BMN/11/2022, tanggal 30 November 2022. Berita Acara tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor R-0164/Adm/11/2022, tanggal 28 November 2022 perihal Surat Pencabutan Hak untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang. Pencabutan hak pembelian dimaksud disebabkan karena adanya wanprestasi atau pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan batas tanggal pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan

perjanjian Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Kementerian Sekretariat Negara Nomor PERJ-01/Setkab/Adm/05/2022, tanggal 20 Mei 2022.

Sedangkan mutasi kurang peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.054.277.805 (BMN Intrakomptabel) berasal dari:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp3.021.021.147 yaitu Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki serta sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Penghentian dimaksud dilakukan sesuai Berita Acara Penghentian Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.5/Setkab/BMN/03/2022	1	376.710.000	-	-	Kendaraan Mobil
2	BA.12/Setkab/BMN/05/2022	12	885.569.402	-	-	Server
3	BA.16/Setkab/BMN/06/2022	14	501.360.448	-	-	Router, Hub dan Switch
4	BA.17/Setkab/BMN/06/2022	6	245.482.740	-	-	Pompa Lumpur dan Pompa Air
5	BA.38/Setkab/BMN/08/2022	40	434.642.384	20	2.459.560	PC Unit, CPU, Monitor, Printer, Jam Elektronik, Dispenser, Facsimile dan Pesawat Telepon
6	BA.39/Setkab/BMN/10/2022	58	577.256.173	3	2.930.000	AC Split, Kamera, CPU, Dispenser, Dispenser, HT, Laptop, PC Unit, Printer, Telepon dan TV
JUMLAH		131	3.021.021.147	23	5.389.560	

2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp33.256.658 yaitu adanya kemahalan harga pada Peralatan dan Mesin berupa 22 unit AC split, sehingga dilakukan koreksi pencatatan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengembalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor 48B/LHP/XVI/05/2022, tanggal 23 Mei 2022 dan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Dalam Renovasi, Peralatan dan Mesin dan Barang Persediaan Nomor: BA. 18/Setkab/BMN/06/2022, tanggal 17 Juni 2022 Pengembalian atas kemahalan harga tersebut telah disetor melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN 944F60N9VHMO67L8 dan NTB 630188626004 tanggal 6 April 2022.

Rincian mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin berdasarkan klasifikasi BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2022

NO.	ASET TETAP (Peralatan dan Mesin)	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	Alat Bantu	1.298.754.740	78.000.000	245.482.740	1.131.272.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.842.065.342	376.710.000	376.710.000	11.842.065.342
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.595.000	0	0	18.595.000
4	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	0	0	10.725.000
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	0	0	1.170.000
6	Alat Ukur	22.000.000	0	0	22.000.000
7	Alat Kantor	5.884.900.853	0	46.045.000	5.838.855.853
8	Alat Rumah Tangga	13.590.742.635	0	77.819.658	13.512.922.977
9	Alat Studio	2.374.757.162	0	134.343.000	2.240.414.162
10	Alat Komunikasi	755.244.410	0	54.913.000	700.331.410
11	Peralatan Pemancar	5.700.000	0	0	5.700.000
12	Alat Kedokteran	3.400.000	0	0	3.400.000
13	Komputer Unit	11.355.891.379	970.563.750	547.695.605	11.778.759.524
14	Peralatan Komputer	11.136.781.587	282.880.000	1.571.268.802	9.848.392.785
JUMLAH		58.300.728.108	1.708.153.750	3.054.277.805	56.954.604.053

Aset Tetap Lainnya
Rp1.331.598.523

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.331.598.523 dan Rp11.100.265.179. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp557.732.800 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp773.865.723. Aset Tetap Lainnya terdiri atas koleksi perpustakaan, lukisan, serta barang bercorak kesenian. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per31 Desember 2021	11.100.265.179
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	9.768.666.656
Koreksi Pencatatan Nilai	188.779.150
Transfer Keluar	9.579.887.506
Saldo per 31 Desember 2022	1.331.598.523
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.331.598.523

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya. Sedangkan rincian mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.768.666.656 adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp188.799.150 berupa:
 - a. Kekurangan volume atas Aset Tetap Renovasi sebesar Rp37.477.200 berupa pekerjaan partisi ruangan kerja pada TA 2021 sesuai Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Dalam Renovasi, Peralatan dan Mesin dan Barang Persediaan Nomor: BA.18/Setkab/BMN/06/2022, tanggal 17 Juni 2022. Pengembalian atas kekurangan volume tersebut telah disetor melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN C2C0E0N9VHMO67T2 dan NTB 773748626997 tanggal 6 April 2022.
 - b. Pengembalian kelebihan pembayaran atas Aset Tetap Renovasi sebesar Rp148.331.950 berupa pekerjaan konstruksi dan konsultan pengawas lantai 1 dan lantai *basement* Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor: BA. 19/Setkab/BMN/06/2022, tanggal 17 Juni 2022. Pengembalian atas kelebihan ATR tersebut telah disetor melalui SSBP dengan NTPN CCE0A61QUH4Q41O8 dan NTB 7000000457632 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp144.681.950 dan SSBP dengan NTPN E44968N3E0RV933L dan NTB 645954698376 tanggal 28 Maret sebesar Rp3.650.000.
 - c. Koreksi Pencatatan atas kurang catat nilai PPN sebesar Rp2.970.000 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Dalam Renovasi Nomor: BA.19/Setkab/BMN/06/2022, tanggal 17 Juni 2022. Koreksi pencatatan tersebut telah ditindaklanjuti dalam Jurnal Koreksi BPK yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Nomor NKF-114/018/PB.6/2022 tanggal 14 April 2022.
2. Transfer keluar Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp9.579.887.506. Hal tersebut sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: BAST-45/ADM-4/12/2022 dan BAST-55/KSN/S/Um/PB.21/12/2022, tanggal 20 Desember 2022. Rincian Transfer Keluar BMN dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Renovasi Ruang Kerja Wakil Sekretaris Kabinet Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp156.904.000.
- b. Ruang *Podcast* Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp241.032.120.
- c. Renovasi *Furniture Custom* Ruang *Pantry* dan Toilet Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp86.944.000.
- d. Renovasi Ruang Kerja Lantai 1 dan *Basement* Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp9.095.007.386.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp44.499.422.683)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp44.499.422.683) dan (Rp40.868.942.285). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Alat Bantu	1.131.272.000	422.374.325	708.897.675
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.842.065.342	11.513.008.200	329.057.142
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.595.000	18.595.000	0
4	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	10.188.750	536.250
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	1.170.000	0
6	Alat Ukur	22.000.000	6.600.000	15.400.000
7	Alat Kantor	5.838.855.853	4.022.190.698	1.816.665.155
8	Alat Rumah Tangga	13.512.922.977	8.227.064.704	5.285.858.273
9	Alat Studio	2.240.414.162	1.415.512.346	824.901.816
10	Alat Komunikasi	700.331.410	670.139.210	30.192.200
11	Peralatan Pemancar	5.700.000	3.135.000	2.565.000
12	Alat kedokteran	3.400.000	1.020.000	2.380.000
12	Komputer Unit	11.778.759.524	9.274.171.965	2.504.587.559
13	Peralatan Komputer	9.848.392.785	8.914.252.485	934.140.300
JUMLAH		56.954.604.053	44.499.422.683	12.455.181.370

C.12 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.499.997. Piutang TPA adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tanggal pelaporan tidak terdapat piutang TPA (Jangka Panjang) karena umur piutang TPA tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang TPA Sekretariat Kabinet berasal dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas jabatan sebesar Rp28.000.000 sesuai Perjanjian Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Sekretariat Kabinet Nomor: PERJ-1/SETKAB/ADM/03/2021 pada tanggal 8 Maret 2021.

C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang TPA

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TPA per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp17.500). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TPA berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

C.14 Aset Tak Berwujud (ATB)

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.632.211.682 dan Rp4.210.800.182. ATB pada Sekretariat Kabinet berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai *software* adalah Rp3.937.314.182, sedangkan nilai lisensi adalah Rp694.897.500. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Mutasi Aset Tak Berwujud s.d 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.210.800.182
Mutasi tambah:	421.411.500
Pembelian	421.411.500
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2022	4.632.211.682
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	-3.771.875.831
Nilai Buku per 31 Desember 2022	860.335.851

Mutasi tambah ATB sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp421.411.500 yang berasal dari pembelian dengan rincian tabel berikut:

Tabel 34 Rincian Pembelian dan Pengembangan Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022

NO.	Nama Barang	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Intrakomptabel		Esktrakomptabel	
					Vol.	Rp	Vol.	Rp
1	Lisensi Zimbra NE	01145A	220181701006545	27-Oct-22	1	53.668.500	-	-
2	Virtual Access Point Controller	01294A	220181701007625	24-Nov-22	1	108.280.500	-	-
3	Pembaharuan Versu Sistem ZIMBRA	01541A	220181701009636	26-Dec-22	1	196.747.500	-	-
4	Pengembangan Web dan Aplikasi E-JFP	01543A	220181701009625	26-Dec-22	1	62.715.000	-	-
JUMLAH					4	421.411.500	-	-

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain
Rp339.889.204

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp339.889.204 dan Rp4.019.948.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat/usang dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Kabinet serta dalam proses penghapusan BMN. Rincian mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain s.d 31 Desember 2022

URAIAN	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	Nilai Aset Lain-Lain
Saldo per 31 Desember 2021	4.019.948.000	0	4.019.948.000
Mutasi Tambah:	3.397.731.147	0	3.397.731.147
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.021.021.147	0	3.021.021.147
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	376.710.000		376.710.000
Mutasi Kurang:	7.077.789.943	0	7.077.789.943
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	6.701.079.943	0	6.701.079.943
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap	376.710.000	0	376.710.000
Saldo per 31 Desember 2022	339.889.204	0	339.889.204

Sampai dengan periode 31 Desember 2022 terdapat mutasi tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp3.397.731.147 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp3.021.021.147. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena kondisi aset tersebut sudah rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 36 Rincian Reklasifikasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomtabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.5/Setkab/BMN/03/2022	1	376.710.000	-	-	Kendaraan Mobil
2	BA.12/Setkab/BMN/05/2022	12	885.569.402	-	-	Server
3	BA.16/Setkab/BMN/06/2022	14	501.360.448	-	-	Router, Hub dan Switch
4	BA.17/Setkab/BMN/06/2022	6	245.482.740	-	-	Pompa Lumpur dan Pompa Air
5	BA.38/Setkab/BMN/08/2022	40	434.642.384	20	2.459.560	PC Unit, CPU, Monitor, Printer, Jam Elektronik, Dispenser, Facsimile dan Pesawat Telepon
6	BA.39/Setkab/BMN/10/2022	61	577.256.173	-	-	AC Split, Kamera, CPU, Dispenser, Dispenser, HT, Laptop, PC Unit, Printer, Telepon dan TV
JUMLAH		33	3.021.021.147	0	2.459.560	

2. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp376.710.000. Hal tersebut sesuai dengan Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor R-0164/Adm/11/2022, tanggal 28 November 2022 perihal Surat Pencabutan Hak untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang. Pencabutan hak pembelian dimaksud disebabkan karena adanya wanprestasi atau pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan batas tanggal pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Kementerian Sekretariat Negara Nomor PERJ-01/Setkab/Adm/05/2022, tanggal 20 Mei 2022.

Mutasi kurang Aset Lain-Lain sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp7.077.789.943 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp6.701.079.943. Penghapusan tersebut dilakukan karena kondisi aset tersebut sudah rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme penjualan secara lelang sesuai dengan Surat Permohonan Izin sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:
 - a. Usulan penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp4.019.948.000 berupa 14 (empat belas) unit kendaraan dinas bermotor roda empat sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-322/MK.6/KNL.0702/2022, tanggal 27 Juni 2022, hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Kabinet dan Surat Deputi

Bidang Administrasi Nomor B.0221/Adm/04/2022, tanggal 25 April 2022, hal Permohonan Izin Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat pada Sekretariat Kabinet.

- b. Usulan penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp376.710.000 berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas bermotor roda empat sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-178/MK.6/KNL.0702/2022, tanggal 17 Mei 2022, hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Kabinet dan Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor B.0185/Adm/04/2022, tanggal 13 April 2022, hal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Melalui Tanpa Lelang.
 - c. Usulan penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp2.304.421.943 berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) unit sesuai dengan Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor B.1268/Adm/11/2022, tanggal 2 November 2022, hal Permohonan Izin Penjualan barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp376.710.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan Kembali dan Perubahan Kondisi Barang Milik Negara dari Penggunaan Yang Sudah Dihentikan Penggunaanya Nomor BA 43.1/Setkab/BMN/11/2022.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp4.111.765.035)

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp4.111.765.035) dan (Rp7.497.747.769). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan/amortisasi, dan nilai buku adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No.	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Software	3.937.314.182	-3.491.604.681	445.709.501
2	Lisensi	694.897.500	-280.271.150	414.626.350
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	339.889.204	-339.889.204	0
JUMLAH		4.972.100.886	-4.111.765.035	860.335.851

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp6.290.278.664

C.17 Utang Pada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.290.278.664 dan Rp6.299.659.452. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Seluruh nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.290.278.664 telah dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak pada bulan Januari 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2023, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Penjelasan Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah
1	Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan November 2022 a.n. Jafar Ali Barsyan dkk sebanyak 3 orang	00011A	230181303000258	18-Jan-23	761.880
2	Tunjangan Khusus Staf Khusus Seskab Bulan Desember 2022	00015A	230181303000259	18-Jan-23	130.160.000
3	Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2022	00014A	230181303000257	18-Jan-23	5.881.085.759
4	Kekurangan Hak Keuangan bulan Desember 2022 Staf Khusus Wakil Presiden dan Asisten Khusus Wakil Presiden Bulan Desember 2022 sebanyak 7 Pejabat Non PNS	00012A	230181303000260	18-Jan-23	232.000.000
5	Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat bulan Oktober s.d. Desember 2022 a.n. Purnomo Sucipto	00010A	230181303000256	18-Jan-23	694.028
6	Kekurangan Hak Keuangan bulan Desember 2022 Staf Khusus Wakil Presiden dan Asisten Khusus Wakil Presiden Bulan Desember 2022 sebanyak 1 Pejabat PNS	00013A	230181303000351	24-Jan-23	45.576.997
JUMLAH					6.290.278.664

Uang Muka dari KPPN
Rp683.175.177

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp683.175.177 dan Rp1.353.714.428. Saldo ini merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp11.754.718.568

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.754.718.568 dan Rp26.135.395.890. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Lainnya Rpo*

D.1. Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional pada Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp24.750.000.

*Beban Operasional
Rp299.857.038.360*

D.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp299.857.038.360 dan Rp271.696.109.280 atau mengalami kenaikan 10,37 persen dari beban operasional periode yang sama tahun lalu. Beberapa penyebab kenaikan Beban Operasional antara lain:

1. Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp11.986.826.382 atau 7,06 persen dari beban pegawai pada periode yang sama tahun lalu. Beban pegawai tersebut berupa gaji pokok dan tunjangan baik PNS dan non PNS. Peningkatan tersebut karena adanya pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, serta pemberian hak keuangan pada saat Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi pejabat dan pegawai non PNS pada SKP dan SKWP. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
2. Kenaikan Beban Persediaan sebesar Rp260.037.756 atau sebesar 4,35 persen dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan persediaan barang konsumsi berupa pengadaan *security paper*, amplop, *cover* risalah, kertas kop, *toner printer* dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya sidang kabinet, rapat terbatas dan rapat pertemuan Presiden dengan seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, berikut jajarannya meliputi Kapolres, Kapolda dan lainnya.
3. Kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp3.347.303.099 atau sebesar 5,12 persen dari Beban Barang dan Jasa pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan biaya program pelatihan, kegiatan *workshop* serta pengadaan soal seleksi kompetensi jabatan

Fungsional Penerjemah Ahli Pertama yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Selain itu, kenaikan Beban Barang dan Jasa juga berasal dari peningkatan jumlah pemakaian *copy* per lembarnya pada biaya sewa mesin fotokopi. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya penggandaan risalah pertemuan Presiden dengan seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten, berikut jajarannya meliputi Kapolres, Kapolda dan lainnya.

4. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas baik perjalanan dinas biasa dan dalam kota, paket meeting dalam kota dan luar kota serta perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp12.658.657.573 atau sebesar 67,24 persen dari beban perjalanan dinas pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan belanja perjalanan dinas tersebut sejalan dengan pemerataan realisasi vaksinasi dan penurunan signifikan kasus harian COVID-19 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi beban barang operasional dan non operasional serta beban jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan akun untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp2.728.370.412 dan beban barang persediaan dengan akun penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp195.005.000 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 39 Realisasi Beban Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2022

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	567.300.000	540.799.883	26.500.117	95,33
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	797.475.000	705.278.350	92.196.650	88,44
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	195.005.000	195.005.000	0	100,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.956.261.000	1.482.292.179	1.473.968.821	50,14
JUMLAH		4.516.041.000	2.923.375.412	1.592.665.588	64,73

*Beban Pegawai
Rp181.760.161.678*

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.760.161.678 dan Rp169.773.335.296 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	39.052.993.153	38.230.964.402	2,15
5115	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	57.344.225.038	245.000.000	23305,81
5122	Beban Lembur	726.780.000	246.318.000	195,06
5124	Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	84.636.163.487	131.051.052.894	-35,42
JUMLAH BEBAN PEGAWAI		181.760.161.678	169.773.335.296	7,06

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.760.161.678 dan Rp169.773.335.296 atau mengalami kenaikan 7,06 persen dari realisasi belanja pegawai periode yang sama tahun 2021. Persentase terbesar kenaikan beban pegawai berdasarkan akun berasal dari Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (akun 5115) sebesar 23.305,81 persen. Hal tersebut disebabkan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, serta pemberian hak keuangan pada saat Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi pejabat dan pegawai non PNS pada SKP dan SKWP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

*Beban Persediaan
Rp6.241.296.138*

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.241.296.138 dan Rp5.981.258.382 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
593111	Beban Persediaan Barang Konsumsi	6.241.296.138	3.315.008.382	88,27
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	-	2.666.250.000	-
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN		6.241.296.138	5.981.258.382	4,35

*Beban Barang dan Jasa
Rp68.668.801.376*

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp68.668.801.376 dan Rp65.321.498.277 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
5211	Beban Barang Operasional	20.709.385.259	18.983.914.211	9,09
5212	Beban Barang Non Operasional	7.402.213.606	8.866.548.838	-16,52
5221	Beban Jasa	40.556.412.511	37.448.916.728	8,30
5951	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	790.000	22.118.500	-96,43
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA		68.668.801.376	65.321.498.277	5,12

Dari jumlah realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp68.668.801.376 tersebut, terdapat realisasi beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp2.728.370.412 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) sebesar Rp540.799.883 yang digunakan untuk pengadaan vitamin dan masker bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) sebesar Rp705.278.350 yang digunakan untuk pengadaan *new normal kit*, *hand sanitizer* dan *tissue* basah pada kegiatan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, dan termasuk juga biaya paket data dan komunikasi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet selama bulan Mei dan Juni yang baru dibayarkan pada Triwulan III tahun 2022.
3. Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) sebesar Rp1.482.292.179 yang digunakan untuk penyemprotan disinfektan pada ruang kerja, pengadaan *Rapid Test*, Swab Antigen dan PCR SARS COV-2 bagi pejabat/pegawai berstatus ODP, bagi pejabat/pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19, pegawai Sekretariat Kabinet yang akan melaksanakan *Work From Office* (WFO), serta Pegawai Sekretariat Kabinet yang melakukan perjalanan dinas.

Beban Pemeliharaan
Rp5.156.436.314

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.156.436.314 dan Rp5.511.027.476 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.590.897.928	852.287.181	86,66
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68.640.630	50.065.380	37,10
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.702.470.016	3.151.821.315	-14,26
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	556.660.972	1.261.645.000	-55,88
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	237.766.768	195.208.600	21,80
JUMLAH		5.156.436.314	5.511.027.476	-6,43

*Beban Perjalanan Dinas
Rp31.484.564.635*

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp31.484.564.635 dan Rp18.825.907.062 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir Pada
31 Desember 2022 dan 2021**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	16.103.093.645	9.770.821.250	64,81
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	861.480.000	461.890.000	86,51
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.806.444.000	1.213.014.207	48,92
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.418.577.509	7.335.918.870	42,02
524219	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	2.294.969.481	44.262.735	5084,88
JUMLAH		31.484.564.635	18.825.907.062	67,24

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp6.545.760.719*

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.545.760.719 dan Rp6.282.995.287 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir
pada 31 Desember 2022 dan 2021**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.246.488.229	6.035.343.361	3,50
592115	Beban Amortisasi <i>Software</i>	221.330.312	177.025.811	25,03
592116	Beban Amortisasi Lisensi	72.745.750	62.990.115	15,49
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	5.196.428	7.636.000	-31,95
JUMLAH		6.545.760.719	6.282.995.287	4,18

*Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih Rp17.500*

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.500 dan

Rp87.500. Beban tersebut terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TPA yang berasal dari piutang TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan yaitu sebesar Rp3.499.993 (penyisihan 0,5%). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN	2022	2021
594311	Beban Penyisihan Piutang TPA	17.500	70.000
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TPA	-	17.500
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		17.500	87.500

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp1.340.136.599*

D.3 Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.340.136.599 dan Rp1.365.176.446 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

AKUN	URAIAN	2022	2021	%
Kegiatan Non Operasional				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.245.540.652	1.732.651.788	-28,11
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	66.555.999	-	
596111	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29.758.214	369.982.300	-91,96
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		1.282.338.437	1.362.669.488	-5,90
Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	7.074	556.958	-98,73
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.950.000	-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	225.478.815	-	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.693.680	-	-
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	173.381.407	-	-
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		57.798.162	2.506.958	2205,51
SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.340.136.599	1.365.176.446	(1,83)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp1.312.096.651

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.312.096.651 dan Rp1.732.651.788. Pendapatan tersebut berasal dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.147.501.437 sesuai Risalah Lelang Nomor 592/26/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berupa 14 (empat belas) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000601645 dan NTPN 9F17C1JNFCNRAPPF tanggal 25 Agustus 2022.
2. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.039.215 sesuai Risalah Lelang Nomor 912/26/2022 tanggal 29 November 2022 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000327024 dan NTPN D305555DENCJI4LN tanggal 1 Desember 2022.
3. Penjualan Peralatan dan Mesin dan barang persediaan sebesar Rp66.555.999 sesuai Risalah Lelang Nomor 1007/26/2022 tanggal 21 Desember 2022 berupa 1 (satu) paket peralatan mesin dan barang persediaan. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000222837 dan NTPN 2BECA7QLU74D0HOC tanggal 22 Desember 2022.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp29.758.214

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp29.758.214 dan Rp369.982.300. Beban tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang untuk dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan/lelang.

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya R231.179.569

D.3.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp231.179.569 dan Rp2.506.958. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp7.074 berupa penyetoran kelebihan pembayaran gaji, uang makan, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tunjangan kinerja pegawai.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp225.478.815 berupa pengembalian atas koreksi pencatatan kemahalan harga atas *Air Conditioner*, Tabung Pemadam Api, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kekurangan

volume Aset Tetap Renovasi serta kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi dan konsultan pengawas renovasi TA 2021.

- c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp5.693.680. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan tersebut berasal dari koreksi pencatatan barang persediaan sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.46.1/Setkab/BMN/12/2022, tanggal 29 Desember 2022.

*Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp173.381.407*

D.3.4 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp173.381.407 dan Rp0. Beban tersebut merupakan nilai perubahan kondisi barang persediaan karena usang/rusak. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Persediaan Nomor: BA.40/Setkab/BMN/10/2022, tanggal 6 Oktober 2022.

*Defisit Laporan Operasional
Rp 298.516.901.761*

D.4 Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp298.516.901.761 dan Rp270.306.182.834. Defisit Laporan Operasional berasal dari selisih antara pendapatan operasional sebesar Rp0 dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp299.857.038.360 dan ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.340.136.599.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp26.135.395.890*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp26.135.395.890 dan Rp10.548.198.156.

*Defisit LO
Rp298.516.901.761*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp298.516.901.761 dan Rp270.306.182.834.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Koreksi Nilai Persediaan
(Rp4.938.012)*

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah koreksi atas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp4.938.012) dan Rp96.500.000. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas kemahalan harga APAR otomatis sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Dalam Renovasi, Peralatan dan Mesin, dan Barang Persediaan Nomor BA.18/Setkab/BMN/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.

*Koreksi Atas Reklasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset
Tetap Lainnya Rpo*

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya

Jumlah koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp857.780.000.

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi (Rp215.384.482)*

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp215.384.482) dan (Rp865.640.665).

Koreksi Lain-lain Rp87.500

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Jumlah koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp87.500 dan Rp0. Koreksi tersebut berasal dari koreksi pencatatan beban penyisihan piutang tidak tertagih TPA.

*Transaksi Antar Entitas
Rp284.356.459.433*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp284.356.459.433 dan Rp285.804.741.233. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 48 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 2021

Transaksi Antar Entitas	2022	2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	295.639.314.880	286.644.904.219
Diterima dari Entitas Lain	(1.702.967.941)	(1.659.769.861)
Pengesahan Hibah Langsung	-	527.000.000
Transfer Keluar	(9.579.887.506)	-
Transfer Masuk	-	292.606.875
Jumlah	284.356.459.433	285.804.741.233

*DKEL Rp295.639.314.880
DDEL (Rp1.702.967.941)*

- **Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah DKEL sebesar Rp295.639.314.880 dan jumlah DDEL sebesar (Rp1.702.967.941).

*Pengesahan Hibah
Langsung Rpo*

- **Pengesahan Hibah Langsung**

Jumlah pengesahan hibah langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp527.000.000. Pengesahan hibah langsung digunakan untuk mencatat hibah langsung dalam bentuk barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dengan mendapatkan manfaat secara langsung untuk mendukung tugas dan fungsi K/L.

*Transfer Keluar
Rp9.579.887.506*

- **Transfer Keluar**

Jumlah Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.579.887.506 dan Rp0. Transfer keluar tersebut berasal dari serah terima barang milik negara berupa Aset Tetap Renovasi Sekretariat Kabinet kepada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp9.579.887.506. Hal tersebut sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: BAST-45/ADM-4/12/2022 dan BAST-55/KSN/S/Um/PB.21/12/2022, tanggal 20 Desember 2022.

Transfer Masuk Rpo

- **Transfer Masuk**

Jumlah Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp292.606.875.

*Ekuitas Akhir
Rp11.754.718.568*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.754.718.568 dan Rp26.135.395.890. Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi penurunan Ekuitas sebesar Rp14.380.677.322 dari nilai Ekuitas pada 1 Januari 2021 sebesar Rp26.135.395.890.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 BARANG MILIK NEGARA

1. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet melakukan penggunaan sementara atas gedung dan bangunan Gedung III Kementerian Sekretariat Negara yang telah disetujui oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/KN.5/2019, tanggal 30 April 2019, hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Sekretariat Kabinet, serta Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Nomor PERJ-05/Kemensetneg/Ses/05/2019 dan Perjanjian Nomor PERJ-1/Setkab/Adm/05/2019. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menggunakan sementara gedung yang terletak di jalan Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Nomor: 11/KSN/S/06/22 dan Perjanjian Nomor PERJ.02/Setkab/Adm/06/2022.
2. Mulai tahun 2022, Sekretariat Kabinet baru menerapkan penggunaan aplikasi SAKTI khususnya dalam kelompok Modul Pelaporan. Namun, sebelum penerapan SAKTI dilakukan, Sekretariat Kabinet melakukan migrasi (pemindahan data) dari *database* aplikasi e-Rekon&LK ke *database* aplikasi SAKTI untuk membentuk saldo awal Neraca. Migrasi tersebut berupa Migrasi Saldo Awal Persediaan, Migrasi Saldo Awal BMN dan Migrasi Saldo Buku Besar Neraca. Proses migrasi ini dilakukan otomatis *by system* dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Migrasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Migrasi (BAM) Saldo Awal BMN Berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya Tingkat Kuasa Pengguna Barang Nomor BAM-21/403112/2022 tanggal 28 Juni 2022. Hasil BAM tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat selisih nilai pada aplikasi e-Rekon&LK dengan Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

- b. Berita Acara Migrasi Saldo Awal Persediaan Tingkat Kuasa Pengguna Barang Nomor BAM-20/403112/2022 tanggal 28 Juni 2022. Hasil BAM tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat selisih nilai pada aplikasi e-Rekon&LK dengan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI.
 - c. Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor BAM-01/403112/2022 tanggal 29 Juni 2022. Hasil BAM tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat selisih nilai pada aplikasi e-Rekon&LK dengan Modul Pelaporan Aplikasi SAKTI.
3. Nilai saldo BMN Ekstrakomptabel yang dimiliki Sekretariat Kabinet per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp234.582.660. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat mutasi tambah Rp22.579.560 dan mutasi kurang Rp12.254.120 sehingga nilai perolehannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.908.100. Nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp126.882.330 sehingga nilai buku BMN 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp118.025.770. Rincian BMN Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022

No.	Ekstrakomptabel	Nilai Perolehan Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin		234.582.660	17.190.000	6.864.560	244.908.100	(126.882.330)	118.025.770
1	Alat Kantor	22.113.000	8.550.000	4.405.000	26.258.000	(10.965.100)	15.292.900
2	Alat Rumah Tangga	47.455.000	5.130.000	175.000	52.410.000	(27.475.130)	24.934.870
3	Alat Studio	144.257.500	1.920.000	-	146.177.500	(71.890.750)	74.286.750
4	Alat Komunikasi	6.092.160	-	2.284.560	3.807.600	(3.807.600)	-
5	Peralatan Komputer	14.665.000	1.590.000	-	16.255.000	(12.743.750)	3.511.250
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		-	5.389.560	5.389.560	-	-	-
1	Alat Kantor	-	2.930.000	2.930.000	-	-	-
2	Alat Rumah Tangga	-	175.000	175.000	-	-	-
3	Alat Komunikasi	-	2.284.560	2.284.560	-	-	-
TOTAL		234.582.660	22.579.560	12.254.120	244.908.100	(126.882.330)	118.025.770

Mutasi tambah BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.579.560 terdiri dari:

1. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.190.000 berasal dari:
 - a. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp790.000 yang menggunakan akun belanja modal sesuai dengan SPM Nomor 00435A dan SP2D Nomor 220181701002744, tanggal 20 Juni 2022.

- b. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.400.000 yang menggunakan akun belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sesuai dengan SPM Nomor 1715A dan SP2D Nomor 220181701011280, tanggal 31 Desember 2022.
2. Mutasi tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp5.389.560 berasal dari:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp2.459.560. sesuai dengan Berita Acara Nomor 38/Setkab/BMN/08/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Perubahan kondisi dan penghentian BMN dari Penggunaan.
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp2.930.000, sesuai dengan Berita Acara Nomor 39/Setkab/BMN/10/2022, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Kondisi dan Penghentian barang Milik Negara dari Penggunaan.

Sedangkan mutasi kurang BMN ekstrakomptabel sebesar Rp12.254.120 terdiri dari:

1. Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.864.560 berasal dari:
 - a. Koreksi atas pencatatan nilai kemahalan harga sebesar Rp1.475.000 berupa tabung pemadam api sesuai Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Dalam Renovasi, Peralatan dan Barang Persediaan Nomor BA.18/Setkab/BMN/06/2022, tanggal 17 Juni 2022.
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp2.459.560. sesuai dengan Berita Acara Nomor 38/Setkab/BMN/08/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Perubahan kondisi dan penghentian BMN dari Penggunaan.
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp2.930.000, sesuai dengan Berita Acara Nomor 39/Setkab/BMN/10/2022, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Kondisi dan Penghentian barang Milik Negara dari Penggunaan.
2. Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan sebesar Rp5.389.560 berasal dari Pemindahtanganan BMN dengan mekanisme Penjualan secara lelang sesuai dengan Surat Deputi

Bidang Administrasi Nomor B.1268/Adm/11/2022, tanggal 2 November 2022, hal Permohonan Izin Penjualan barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.

4. Per 31 Desember 2022, terdapat 1 (satu) kontrak pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Kabinet yang memiliki masa pemeliharaan melampaui tahun 2022, yaitu pekerjaan pengecatan dinding bagian luar gedung III kantor Sekretariat Kabinet. Atas kontrak tersebut, penyedia barang/jasa telah menyampaikan jaminan pemeliharaan sebesar Rp38.251.798 atau 5% dari nilai kontrak atas pekerjaan pengecatan dinding bagian luar gedung III kantor Sekretariat Kabinet oleh CV Mutiara Karya Utama. Jaminan pemeliharaan tersebut diterbitkan oleh PT Asuransi Maximus Graha Perkasa, Tbk berlaku selama 180 hari kalender, efektif mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 16 Juni 2023.

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2021 pada bulan Februari sampai dengan Mei 2022. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 terlampir pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022.

Rekening Pemerintah Rp511.740.231

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabinet pada Bank Negara Indonesia 46 Cabang Harmoni dengan nomor rekening 0018306949 dan nama rekening BPG 018 Sekretariat Kabinet telah dilakukan penutupan dan pemindahbukuan menjadi rekening virtual dengan nomor rekening 9890534031121000 dan nama rekening BPG 018 SETKAB. Pemindahbukuan dan penutupan rekening tersebut dilakukan atas dasar surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-269/PB.3/2021, tanggal 19 Februari 2021, hal Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening lingkup Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Bank BNI. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp551.740.231.

Adapun perubahan rekening Sekretariat Kabinet disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50 Tabel Rekening dan *Virtual Account* Sekretariat Kabinet Tahun 2022

No	Nama Bank	No. Rekening/ No. Virtual Account	Nama Rekening/ Nama Virtual Account	Keterangan		
				Aktif	Tidak Aktif	Surat Ijin Pembukaan/ Surat Pemindahbukuan dan Penutupan
1	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	0018306949	BPP 018 Sekretariat Kabinet		√	S-1463/WPB.12/KP.018/2015, Tgl 17 Apr 2015 S-269/PB.3/2021, Tgl 19 Februari 2021
2	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	374893101	BPP 018 Sekretariat Kabinet		√	S-527/WPB.12/KP.018/2015, Tgl 16 Feb 2015 HMN/070.01/128, Tgl 30 November 2021
3	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121000	BPG 018 SETKAB	√		S-422/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 2 Mar 2020
4	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121001	BPP 018 SETKAB 01	√		S-422/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 2 Mar 2020
5	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121002	BPP 018 SETKAB 02	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
6	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121003	BPP 018 SETKAB 03	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
7	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121004	BPP 018 SETKAB 04	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
8	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121005	BPP 018 SETKAB 05	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
9	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121006	BPP 018 SETKAB 06	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
10	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121007	BPP 018 SETKAB 07	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
11	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121008	BPP 018 SETKAB 08	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
12	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121009	BPP 018 SETKAB 09	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020

SEKRETARIAT KABINET
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN/AMORTISASI, AKUMULASI
PENYUSUTAN/AMORTISASI DAN NILAI BUKU ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Saldo Awal Penyusutan	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
			1 Januari 2022	Jan s.d. Des 2022	s.d 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
A	Peralatan dan Mesin					
1	Alat Bantu	1.131.272.000	484.456.602	(62.082.277)	422.374.325	708.897.675
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.842.065.342	11.425.893.913	87.114.287	11.513.008.200	329.057.142
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.595.000	18.595.000	-	18.595.000	-
4	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	9.116.250	1.072.500	10.188.750	536.250
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	1.053.000	117.000	1.170.000	-
6	Alat Ukur	22.000.000	2.200.000	4.400.000	6.600.000	15.400.000
7	Alat Kantor	5.838.855.853	3.298.895.913	723.294.785	4.022.190.698	1.816.665.155
8	Alat Rumah Tangga	13.512.922.977	5.964.583.600	2.262.481.104	8.227.064.704	5.285.858.273
9	Alat Studio	2.240.414.162	1.247.416.498	168.095.848	1.415.512.346	824.901.816
10	Alat Komunikasi	700.331.410	712.515.410	(42.376.200)	670.139.210	30.192.200
11	Peralatan Pemancar	5.700.000	2.565.000	570.000	3.135.000	2.565.000
12	Alat Kedokteran	3.400.000	340.000	680.000	1.020.000	2.380.000
13	Komputer Unit	11.778.759.524	8.397.083.370	877.088.595	9.274.171.965	2.504.587.559
14	Peralatan Komputer	9.848.392.785	9.304.227.729	(389.975.244)	8.914.252.485	934.140.300
	Jumlah Penyusutan	56.954.604.053	40.868.942.285	3.630.480.398	44.499.422.683	12.455.181.370
B	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah					
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	-	4.019.948.000	(4.019.948.000)	-	-
2	Peralatan Komputer	339.889.204	-	339.889.204	339.889.204	-
	Jumlah Penyusutan	339.889.204	4.019.948.000	(3.680.058.796)	339.889.204	0
	Jumlah Penyusutan (A + B)	57.294.493.257	44.888.890.285	(49.578.398)	44.839.311.887	12.455.181.370
C	ASET TAK BERWUJUD					
1	Software	3.937.314.182	3.270.274.369	221.330.312	3.491.604.681	445.709.501
2	Lisensi	694.897.500	207.525.400	72.745.750	280.271.150	414.626.350
	Jumlah Amortisasi	4.632.211.682	3.477.799.769	294.076.062	3.771.875.831	860.335.851
	Total Penyusutan dan Amortisasi	61.926.704.939	48.366.690.054	244.497.664	48.611.187.718	13.315.517.221

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL) Lampiran II: Neraca Percobaan Akruar

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (114) SEKRETARIAT KABINET

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	683,175,177	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1,123,663,654	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	8,308,578	0
0.0	115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3,499,993	0
0.0	116311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	17,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,173,785,888	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	88,640,875	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	56,954,604,053	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	557,732,800	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	773,865,723	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	44,499,422,683
0.0	162151	Software	3,937,314,182	0
0.0	162161	Lisensi	694,897,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	339,889,204	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	339,889,204
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,491,604,681
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	280,271,150
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,290,278,664
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	683,175,177
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	295,639,314,880
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,702,967,941	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,579,887,506	0
0.0	391111	Ekuitas	0	26,135,395,890
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	4,938,012	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	215,384,482	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	87,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,245,540,652
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	66,555,999
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	7,074
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	225,478,815
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	5,693,680
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	25,637,554,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	398,673	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,694,105,110	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	464,182,976	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,712,750,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	257,994,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	251,357,274	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL) Lampiran II: Neraca Percobaan Akrua

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (114) SEKRETARIAT KABINET

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,340,928,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,148,406,900	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	545,315,000	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	245,000,000	0
3.0	511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	57,099,225,038	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	726,780,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	84,636,163,487	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,358,180,035	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	247,310,906	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	775,184,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,787,910,435	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	540,799,883	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,716,128,736	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,524,270,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	440,136,520	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	705,278,350	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17,190,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	274,325,848	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	193,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	32,969,950,505	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,680,630,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,956,213,979	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,482,292,179	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,590,897,928	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68,640,630	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,702,470,016	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	556,660,972	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	16,103,093,645	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	861,480,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,806,444,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,418,577,509	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,294,969,481	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,246,488,229	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	221,330,312	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	72,745,750	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	5,196,428	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,241,296,138	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	237,766,768	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL) Lampiran II: Neraca Percobaan Akrua

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (114) SEKRETARIAT KABINET

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594311	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	17,500	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	29,758,214	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	173,381,407	0
JUMLAH			378,902,733,549	378,902,733,549

WWW.SETKAB.GO.ID
JL. VETERAN 17-18 JAKARTA PUSAT

#recoverttogether #recoverstronger

